

**KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA DALAM
PEMERIKSAAN KAPAL CARGO DI WILAYAH
LAUT INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

LUPERIA BR SITEPU

NPM : 18300183

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA DALAM
PEMERIKSAAN KAPAL CARGO DI WILAYAH
LAUT INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

LUPERIA BR SITEPU

NPM : 18300183

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1.....


2. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2.....



3. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.....



**KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA DALAM
PEMERIKSAAN KAPAL CARGO DI WILAYAH
LAUT INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

LUPERIA BR SITEPU

NPM : 18300183

SURABAYA, 17 Januari 2022

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Luperia Br Sitepu

NPM : 18300183

Alamat : Perum Alam Singgasana Blok U-07 Gresik

No. Telp (HP) : 082244447980

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul berjudul **“KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PEMERIKSAAN KAPAL CARGO DI WILAYAH LAUT INDONESIA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 4 Januari 2022

Yang menyatakan,

PENULIS



Luperia Br Sitepu

MOTTO

“Diatas langit masih ada langit”

“Semakin banyak tahu, semakin banyak tidak tahu”

Luperia Br Sitepu

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Esa, berkat penyertaanNya yang tidak terbatas sehingga skripsi yang berjudul “**KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PEMERIKSAAN KAPAL CARGO DI WILAYAH LAUT INDONESIA**” dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih untuk segala motivasi, bantuan, semangat juga inspirasi:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS sebagai Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan pengarahan, selama masa perkuliahan.
4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersusah payah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberi pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini, hormat saya sedalam-dalamnya.
5. Dr. Endang Retnowati, S.H., M. Hum sebagai Ketua Dosen Penguji, hormat saya sedalam-dalamnya atas masukan dan didikan yang tiada ternilai.
6. Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum sebagai Anggota Dosen Penguji, hormat saya sedalam-dalamnya untuk arahan dan didikan yang tiada ternilai.
7. Bapak Melkianus Lubalu, CEO PT. Bumi Indah Lines, Ibu Sofiyah Wadoe, hormat saya yang terdalam yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata.
8. Khusus Captain Eben Benediktus Aramana, untuk support yang luar biasa serta doa yang tulus.
9. Rekan sejawat PT. Bumi Indah Lines, PT. Ekpedisi Samudra Indah Lines, PT. PBM Trisna Stuwarido.

10. Ibunda tercinta Br Tarigan, yang tidak lelah-lelah mengiringi langkah-langkah saya dengan doa yang tulus, Richa Ariyacely Angelika, Febiciano Zubastian anak-anak terkasih, keluarga Sitepu Rumah Mbaru Sukanalu.
11. Iman Setiawan, Dinda Hanifah, Lisa Indriani, Dennis Mercury, David Simangunsong, David Febrianto, yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang membuat suasana sangat menyenangkan dalam perkuliahan.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
14. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Harapan terbesar penulis, ke depannya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Fakultas Hukum lebih jaya dan berkarya dalam dunia pendidikan. Semoga karya yang kurang sempurna ini dapat memberi sumbangsih bagi lingkungan kampus terutama bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,
PENULIS

LUPERIA BR SITEPU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Masalah.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	24
BAB II KONSTRUKSI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA	
DALAM PEMERIKSAAN KAPAL CARGO DI LAUT.....	26
A. Kewenangan Syahbandar.....	26
B. Tugas dan Kewenangan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).....	29
C. Tugas dan Kewenangan Polair.....	31
D. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Bakamla.....	37
E. Tugas, Fungsi dan Wewenang TNI-AL.....	40
BAB III HARMONISASI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PEMERIKSAAN	
KAPAL CARGO DI LAUT.....	49
A. Tidak ada Komunikasi antara Petugas Patroli.....	49
B. Integrasi antar Lembaga.....	58

BAB 1V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	 75

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Kewenangan Antar Lembaga Dalam Pemeriksaan Kapal Cargo di Wilayah Laut Indonesia guna memberi kenyamanan dan keamanan serta kepastian hukum bagi pengguna transportasi laut. Belum terciptanya harmonisasi antar lembaga menyebabkan tumpang tindihnya pemeriksaan kapal-kapal, khususnya bagi pengguna transportasi kapal dalam negeri. Tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga sama tingkatannya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama kecuali Bakamla. Pembentukan Bakamla diperintahkan dalam undang-undang Pelayaran. Akan tetapi pembentukan Bakamla sebagai coast guard Indonesia bukan suatu solusi, karena dalam UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa TNI adalah garda terdepan penegakan hukum dan keamanan di wilayah perairan Indonesia dan penjaga Laut dan Pantai merupakan Sea and Coast Guard Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam UNCLOS III Tahun 1982 yang telah diratifikasi. Adanya ego sektoral masing-masing lembaga serta kurangnya harmonisasi serta komunikasi antar lembaga berimbas pada pengguna jasa pelayaran. Belum ada mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal di laut menjadikan kesenjangan antar pengguna jasa pelayaran dengan penegak hukum di laut.

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Berdasarkan analisa terdapat lima lembaga negara yang terkait dalam pemeriksaan kapal cargo di wilayah laut Indonesia yaitu Syahbandar, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Direktorat Polisi Air dan Laut, Badan Keamanan Laut dan TNI-AL. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pemeriksaan kapal cargo ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pendekatan teoritik dilakukan melalui Teori Sistem Hukum dan Teori Kewenangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat suatu kesimpulan. Tumpang tindihnya pemeriksaan di wilayah laut Indonesia disebabkan kurangnya komunikasi serta harmonisasi antar lembaga penegak hukum yang belum terintegritas antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Sinergi antara TNI-AL sebagai lembaga murni militer menjadi pertahanan utama di wilayah maritim dengan Bakamla sebagai koordinator tunggal lembaga sipil belum berjalan dengan baik dan terpadu.

KATA KUNCI: Kewenangan; Lembaga; Pemeriksaan Kapal Cargo

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the Inter-Agency Authority in Inspecting Cargo Ships in the Indonesian Sea Area in order to provide comfort and security as well as legal certainty for sea transportation users. The lack of harmonization between institutions has caused overlapping inspections of ships, especially for domestic ship transportation users. The duties, functions and authorities of each institution are the same level and have the same legal force, except for Bakamla. The formation of Bakamla is ordered in the Shipping law. However, the establishment of Bakamla as the Indonesian coast guard is not a solution, because the 1945 Constitution clearly states that the TNI is the front line in law enforcement and security in Indonesian waters and the Sea and Coast Guard is the Indonesian Sea and Coast Guard. in accordance with what was mandated in UNCLOS III of 1982 which had been ratified. The existence of sectoral egos of each institution and the lack of harmonization and communication between institutions have an impact on shipping service users. There is no clear mechanism for conducting inspections of ships at sea, creating a gap between users of shipping services and law enforcement at sea.

The research method used is normative juridical. Based on the analysis, there are five state institutions involved in the inspection of cargo ships in the Indonesian seas, namely the harbormaster, the Marine and Coast Guard, the Directorate of Water and Marine Police, the Maritime Security Agency and the Indonesian Navy. The legislation that forms the basis for this cargo ship inspection is Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The theoretical approach is carried out through Legal System Theory and Authority Theory.

Based on the research conducted, there is a conclusion. The overlapping of inspections in Indonesian marine areas is due to the lack of communication and harmonization between law enforcement agencies that have not been integrated between one institution and another. The synergy between the TNI-AL as a purely military institution as the main defense in the maritime area with Bakamla as the sole coordinator of civilian institutions has not been going well and in an integrated manner.

KEYWORDS: Authority; Institution; Cargo Ship Inspection